PREDIKSI
Jurnal Administrasi & Kebijakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus Samarinda

Abba, H.A., Prananda, A.R.P, Pamungkas, H.L (2026). Implementasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako Dan PKH Melalui PT Pos Gresik. *Prediksi. Vol. 25 (1) 120-132.*

Implementasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako Dan PKH Melalui PT Pos Gresik

Hafieza Amanda Abba[1], Ameilya Rizka Putri Prananda[2], Hertucaesar Lanang Pamungkas[3]
[1,2,3]*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*
Email: [1]22041010072@student.upnjatim.ac.id , [2]22041010150@student.upnjatim.ac.id , [3]22041010231@student.upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Received:
21 Januari 2026
Received in revised form:
25 Februari 2026
Accepted:
27 Maret 2026

Keyword:
Implementation of Distribution, Social Assistance, Basic Food and PKH, PT Pos Gresik.

Kata Kunci:
Implementasi Penyaluran, Bantuan Sosial, Sembako dan PKH, PT Pos Gresik.

ABSTRACT
This research analyzes the implementation of the distribution of the Sembako Social Assistance Program (Bansos) and the Family Hope Program (PKH) by PT Pos Gresik. The background is the issue of poverty in Gresik Regency and the role of PT Pos as a government partner in social assistance distribution. Although the realization of distribution in 2024 reached 94.86%, there are still challenges in distribution. Using a descriptive qualitative method, this study interviewed key informants at PT Pos Gresik. The results show that program implementation, including socialization, distribution, and utilization, has gone well. Socialization was conducted effectively and collaboratively. Delivery activities were considered good in terms of timeliness, quantity, quality, and targeting, despite facing geographical constraints and KPM absence. Utilization of assistance by KPM is also in accordance with the objectives. It was concluded that the implementation was effective with a good role from PT Pos Gresik, although there were challenges that hindered it a little.

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis implementasi penyaluran Program Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh PT Pos Gresik. Latar belakangnya adalah isu kemiskinan di Kabupaten Gresik dan peran PT Pos sebagai mitra pemerintah dalam distribusi bansos. Meskipun realisasi penyaluran pada tahun 2024 mencapai 94,86%, masih ada tantangan dalam penyalurannya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mewawancarai informan kunci di PT Pos Gresik. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi program, meliputi sosialisasi, penyaluran, dan pemanfaatan, telah berjalan baik. Sosialisasi dilakukan secara efektif dan kolaboratif. Penyaluran (delivery activities) dinilai baik dalam ketepatan waktu, kuantitas, kualitas, dan sasaran, meskipun menghadapi kendala geografis dan ketidakhadiran KPM. Pemanfaatan bantuan oleh KPM juga sesuai tujuan. Disimpulkan bahwa implementasi berjalan efektif dengan peran baik dari PT Pos Gresik, meskipun terdapat tantangan yang sedikit menghambat.

This is an open access article under the CC BY-SAlicense

Corresponding author: 22041010072@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memiliki potensi besar, namun juga menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan kemajuan. Tantangan yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Menurut Data Badan Pusat Statistik (2025), persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57 persen menunjukkan angka penurunan dari Maret 2024 yaitu sebesar 0,46 persen. Meskipun persentase penduduk miskin terus menurun, jumlah mereka tetap signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil pedesaan.

Penyebab kemiskinan di Indonesia bersifat kompleks, melibatkan faktor-faktor struktural, seperti ketimpangan distribusi kekayaan maupun rendahnya kualitas sumber daya manusia. BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Mardiah et al., 2024). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Dan Pasal 27 Ayat 2 yang tertulis bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" dan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangganan Fakir Miskin. Landasan peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menanggulangi kemiskinan.

Kabupaten Gresik adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 1.191,25 km², terbagi menjadi 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Gresik tergolong tinggi di Jawa Timur, didorong oleh sektor industri dan jasa yang pesat. Beragam jenis industri, mulai dari industri besar, sedang, hingga berskala rumahan, berkembang di daerah ini. Namun Kabupaten Gresik saat ini pun masih menjadi salah satu wilayah yang bergelut dengan kemiskinan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik

TAHUN	JUMLAH RIBU JIWA
2021	166, 35
2022	149, 64
2023	149, 75
2024	142,390

Sumber: Badan Pusat Statistik diakses pada tanggal 27 Februari 2025

Berdasarkan tabel diatas, penduduk miskin di Kabupaten Gresik mengalami sedikit penurunan meskipun belum signifikan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Maret 2024 adalah 142.390 Jiwa atau 10,32% dari total penduduk. Jumlah ini menurun sekitar 7.360 jiwa dibanding Maret 2023.

Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya memajukan pembangunan di beberapa sektor melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya. Telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan mengurangi beban masyarakat, salah satunya dengan adanya program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial berupa bantuan Sembako dan PKH. Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2020 (Kemensos RI, 2025). Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Sedangkan menurut (Nazara & Rahayu, 2013), program Keluarga Harapan (PKH) sendiri merupakan program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia yang

diluncurkan pada tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos), baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) sudah mulai disalurkan sejak awal Juli tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup dan memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pemprov DKI Jakarta, 2015). Bantuan ini disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara) dan PT Pos. Perbedaan utama antara penyaluran bansos melalui Himbara dan PT Pos terletak pada jenis bantuan yang disalurkan. Himbara fokus pada penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai saja. Sebaliknya, PT Pos menyalurkan bantuan sosial berupa sembako sekaligus Program Keluarga Harapan (PKH). PT Pos Indonesia diharapkan menjadi mitra penyalur yang efektif karena jaringannya yang luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, yang pertama yaitu hasil penelitian Palili et al. (2024) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa efektivitas program bantuan PKH di desa Cibeureum belum efektif, bahkan banyak yang tidak tepat sasaran. Faktor penghambat datang dari kurangnya inisiatif operator desa dalam memprioritaskan masyarakat tidak mampu serta kurangnya komunikasi antara operator desa dan pendamping PKH dalam mengumpulkan data masyarakat yang dapat menjadi KPM. Kedua, penelitian M. Luqman Abdul Aziz & Kalvin Edo Wahyudi (2023) yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, penelitian tersebut menjelaskan bahwa bantuan BST untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya efektif karena bantuan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sejauh ini belum terdapat penelitian yang membahas efektivitas penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH dengan berfokus pada Kantor Pos sebagai tempat distribusinya dengan menggunakan teori efektivitas.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan transformasi dalam sistem penyaluran bantuan, salah satunya dengan menggandeng PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur. Tersebar secara luas dan merata diseluruh wilayah di Indonesia, PT POS Indonesia menjadi salah satu BUMN yang memberi sumbangsih besar pada masyarakat, dengan menyediakan berbagai layanan dan produk yang bisa dengan mudah dijangkau (Verianty, 2022). Di balik tugas utama kantor pos, yaitu melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos, kantor pos juga berperan sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) dari pemerintah karena jaringan layanannya yang luas dan sistem distribusi yang terorganisir dengan baik. Dengan keberadaan kantor yang tersebar hingga ke daerah terpencil, Kantor Pos mampu menjangkau penerima manfaat secara lebih efektif dibandingkan dengan metode distribusi lainnya.

PT Pos Gresik atau Kantor Pos Gresik berhasil menjalankan perannya sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan menyalurkan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam Program Sembako, penerima manfaat mendapatkan bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga kurang mampu. Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat untuk

mendukung pemenuhan kebutuhannya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2024 kemarin, realisasi penyaluran Bansos Sembako dan PKH melalui Kantor Pos Indonesia mencapai 48.939 dan pencapaian sebesar 94,86 %.

Tabel 2. Realisasi Penyaluran Bansos Sembako dan PKH Tahun 2024

No	Kode	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Jumlah Reversal	Sisa	Pencapaian (%)
1	352501	Dukun	3.113	2.973	0	140	95.50%
2	352502	Balongpanggang	2.399	2.250	0	149	93.79%
3	352503	Panceng	3.407	3.326	0	81	97.62%
4	352504	Benjeng	3.193	3.028	0	165	94.83%
5	352505	Duduksampeyan	3.338	3.174	1	165	95.06%
6	352506	Wringinanom	3.522	3.333	0	189	94.63%
7	352507	Ujungpangkah	2.226	2.139	0	87	96.09%
8	352508	Kedamean	2.601	2.465	0	136	91.80%
9	352509	Sidayu	2.581	2.480	0	101	96.42%
10	352510	Manyar	3.048	2.798	0	250	97.96%
11	352511	Cerme	2.376	2.291	0	85	91.69%
12	352512	Bungah	4.958	4.858	1	101	94.92%
13	352513	Menganti	3.574	3.277	0	297	90.92%
14	352514	Kebomas	2.028	1.925	0	103	93.99%
15	352515	Driyorejo	2.517	2.281	0	236	90.62%
16	352516	Gresik	2.763	2.597	0	166	93.99%
17	352517	Sangkapura	2.765	2.603	0	162	94.14%
18	352518	Tambak	1.178	1.141	0	37	96.86%
		TOTAL	**51.587**	**48.939**	**2**	**2.650**	**94.86%**

Sumber: Data instansi diperoleh pada tanggal 2 Maret 2025

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah realisasi penyaluran Bansos Sembako dan PKH melalui Kantor Pos Gresik belum sepenuhnya mencapai jumlah alokasinya dan terjadi reversal sebanyak dua kali. Pencapaiannya pun belum maksimal yaitu sebesar 94,86%. Sehingga penyaluran Bansos Sembako dan PKH melalui Kantor Pos Gresik belum dapat dikatakan maksimal karena ada 5,14% yang tidak tersalurkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kesiapan lembaga pelaksana di daerah termasuk Kantor Pos sebagai mitra penyalur.

Setiap program pasti memiliki suatu tantangan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan kajian yang mendalam untuk mengetahui implementasi penyaluran program sembako dan PKH melalui Kantor Pos Gresik apakah berjalan sesuai harapan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Adapula Teori Implementasi Kebijakan menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015, 75), terdapat tiga fokus yang bisa mewujudkan proses implementasi kebijakan, yaitu meliputi sosialisasi, penyaluran (*delivery activities*), dan pemanfaatan. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi penyaluran bantuan sosial melalui Kantor Pos Gresik untuk mencapai konsep-konsep implementasi di atas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan

situasi saat penelitian dilakukan, sehingga dapat mengetahui informasi detail sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan pada PT Pos Kabupaten Gresik. Lokasi tersebut dipilih karena Kabupaten Gresik memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya penerima bantuan sosial sembako PKH yang cukup banyak. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah para karyawan yang terkait langsung dalam penyaluran Bansos dan PKH yakni SPV Operasi Pelayanan, SPV Penjualan Bisnis Ritel dan Kemitraan, serta SPV Administrasi Keuangan dan Dukungan Umum PT Pos Gresik.

Fokus penelitian yaitu penjelasan dari kerangka berpikir yang telah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian sangat berkaitan dengan perumusan masalah, di mana masalah yang diteliti menjadi dasar dalam menentukan arah dan lingkup penelitian. Pada penelitian ini, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako dan PKH melalui Kantor Pos Gresik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam La Ode Muhammad Elwan et al. (2022) Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana proses Implementasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako dan PKH melalui Kantor Pos Gresik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Sosial Sembako dan PKH merupakan inisiatif perlindungan sosial di Indonesia yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup keluarga tidak mampu dan rentan (Arnani, 2025). Program yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) ini, telah disalurkan mulai dari Bulan Juli 2021. Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN telah bersepakat mengenai skema penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako kepada masyarakat. Penyaluran ini akan dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Kesepakatan tersebut tercapai setelah adanya pertemuan antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Ananda, 2023).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki akses ke bank dapat mencairkan bantuan tunai di cabang atau ATM terdekat. Namun, jika bantuan tidak diambil sesuai waktu yang ditetapkan, PT Pos akan mengambil alih penyaluran. Menteri Sosial juga menegaskan bahwa bantuan pangan nontunai (BPNT) atau sembako kini akan didistribusikan melalui PT Pos, bukan lagi melalui e-warong. Penyaluran via PT Pos ini difokuskan untuk menjangkau daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) dan masyarakat yang sulit mengakses layanan bank. Wakil Menteri BUMN menyatakan bahwa PT Pos akan menangani lebih dari 50% wilayah 3T. Dengan ini, PT Pos berperan sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH.

PT Pos Indonesia terus mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di berbagai daerah di Indonesia, bantuan sembako Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil disalurkan berkat kerja keras dan dedikasi para petugas PT Pos Indonesia yang terus berupaya

memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. PT Pos Gresik merupakan salah satunya yang diketahui telah menjalankan penyaluran bantuan ini dengan baik. Di samping banyaknya pabrik dan lapangan kerja hingga Gresik mendapat julukan sebagai Kota Industri, masih banyak sekali penduduk Gresik yang tergolong tidak mampu, sehingga bansos sembako dan PKH terus disalurkan dari tahun ke tahun dengan jumlah KPM yang masih banyak. Penyaluran *door to door* ke masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil khususnya, selalu diterapkan oleh PT Pos Gresik hingga bantuan tersebut benar-benar berhasil tersalurkan pada KPM sesuai jumlah alokasi yang telah ditentukan.

Di samping tersalurkannya bansos berupa sembako dan PKH melalui PT Pos Gresik, pasti terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat proses penyaluran bantuan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana implementasi penyaluran bantuan ini dilakukan melalui PT Pos Gresik. Proses implementasi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa bantuan dapat diterima secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemahaman terhadap implementasi ini juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan." (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004). Program diartikan sebagai serangkaian tahapan yang berisi langkah-langkah yang harus diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan, menjadikannya elemen esensial pertama dalam implementasi. Sementara itu, penyaluran adalah proses pengiriman produk kepada pengguna atau konsumen dengan tepat waktu.

Implementasi penyaluran program merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat terhadap objek atau sasaran tertentu, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui struktur organisasi, interpretasi, dan penerapan. Keberhasilan implementasi suatu program menjadi tanggung jawab pihak yang ditugaskan untuk melaksanakannya. Petugas PT Pos Gresik yang menjadi bagian dari penyaluran bansos berupa sembako dan PKH, memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas dan perannya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi hambatan mereka dalam menyalurkan bansos berupa sembako dan PKH tersebut.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Raih Sulistyastuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target grup) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran dalam jangka panjang, hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Untuk menjamin implementasi berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai, perlu didahului dengan kegiatan sosialisasi kepada kelompok sasaran. Setelah proses sosialisasi, maka kegiatan selanjutnya adalah *delivery activities* untuk menyampaikan *policy output* kepada kelompok sasaran. Dan terakhir dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan utama kelompok sasaran (Purwanto, 2015).

Mengacu pada indikator terjaminnya suatu implementasi sebagaimana telah disampaikan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Raih Sulistyastuti yang dijelaskan di atas,

maka dalam pengukuran Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan PKH melalui PT Pos Gresik hendaknya dapat memenuhi tiga aspek, yakni Sosialisasi, Penyaluran (*delivery activities*) yang dilihat dari ketepatan waktu, jumlah, kualitas, dan sasaran, serta yang terakhir aspek Pemanfaatan. Peneliti dapat menjelaskan indikator-indikator tersebut dengan menggunakan teori Implementasi dari Erwan Agus Purwanto dan Dyah Raih Sulistyastuti sebagai berikut:

A. Sosialisasi

Sebelum suatu kebijakan disampaikan atau dijalankan, penting untuk memberikan informasi terlebih dahulu kepada kelompok sasaran. Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015), tujuan pemberian informasi ini agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya menerima tetapi juga berperan aktif dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Pada proses penyaluran bantuan sosial Sembako dan PKH melalui kantor pos gresik digunakan untuk memastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) memahami hak dan kewajiban serta proses teknis pencairan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Saiful kegiatan sosialisasi dilakukan secara berjenjang dan kolaboratif. PT Pos Gresik bekerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan. sosialisasi umumnya dilakukan sebelum periode penyaluran bantuan sosial dimulai. Media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi mencakup pertemuan tatap muka dengan perangkat desa dan juga KPM guna menyebarkan informasi melalui pemberitahuan resmi. Pihak Kantor Pos Gresik juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu, pendamping atau petugas lapangan berperan aktif dalam menjelaskan kepada KPM mengenai waktu dan lokasi pencairan bantuan. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran Surat Pemberitahuan (SP) kepada KPM yang secara kolaboratif dibagikan oleh PT Pos Gresik melalui perangkat desa/kelurahan yang umumnya berisi waktu dan lokasi pencarian bantuan.

Efektivitas kegiatan sosialisasi ini tercermin dari respons masyarakat, di mana para KPM terbukti hadir secara tertib di titik kumpul pengambilan bantuan sosial sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bahkan hanya dalam waktu sehari setelah SP disebarkan. PT Pos Gresik menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat membantu dalam mempercepat proses distribusi informasi kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan dapat berlangsung secara tertib, tepat waktu, dan minim kendala di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial tidak hanya menjadi langkah awal, tetapi merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Sosialisasi yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepatuhan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diterapkan.

B. Penyaluran (*delivery activities*)

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015), *delivery activities* (kegiatan penyaluran) adalah kegiatan untuk menyampaikan *policy output* kepada kelompok sasaran. Tujuan dari *delivery activities* ini adalah sampainya *policy output* kepada kelompok sasaran. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan penyaluran (*delivery activities*) dinilai dari sejauh mana layanan, hibah, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kriteria baik di sini dapat dijelaskan melalui beberapa indikator, yaitu tepat penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas dan tepat sasaran.

Berdasarkan pernyataan di atas, implementasi penyaluran bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT Pos Gresik dapat diketahui melalui beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

a. Tepat waktu penyampaian

Penyampaian informasi penyaluran bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT Pos Gresik ini melalui SP (surat panggilan) yang disebar kepada KPM. SP tersebut dibagikan langsung oleh PT Pos Gresik ke alamat KPM dan ada pula surat yang diserahkan ke pihak desa atau kelurahan yang masyarakatnya banyak tergolong kurang mampu dan mendapatkan bantuan. Hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat penyebaran undangan bantuan tersebut kepada masyarakat suatu desa. Selain itu kerjasama dengan kepala desa berguna mengetahui lebih lanjut karena pihak desa juga diberi kewenangan untuk verifikasi apakah KPM yang terdata sudah mampu atau masih belum mampu.

Berikutnya, terkait penyaluran bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri sudah tepat waktu yakni dilakukan setiap triwulan di beberapa titik bayar. Menurut Bapak Saiful selaku SPV Operasi Pelayanan, PT Pos Gresik telah mengupayakan penyaluran ini efektif dan efisien sesuai waktu yang diamanatkan. Untuk mempercepat penyaluran ini, PT Pos Gresik berupaya mendekati langsung ke tempat KPM berada (jemput bola), dengan cara bekerja sama komoditas misalnya di Kantor Kelurahan desa setempat.

Penyaluran bantuan ini dilakukan berdasarkan target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana setiap proses penyaluran harus diselesaikan paling lambat pada tanggal tertentu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dalam satu periode penyaluran, rata-rata waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan pembayaran bantuan yang utama oleh PT Pos Gresik adalah satu minggu. Terdapat pula kebijakan perpanjangan waktu dari Kementerian Sosial yang diberikan dengan mempertimbangkan progres penyaluran di lapangan, termasuk adanya hambatan-hambatan signifikan yang mungkin terjadi. Waktu perpanjangan ini bersifat variatif dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah atau pelaksana program.

Namun, di samping itu, proses penyaluran bantuan sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat menghambat ketepatan waktu distribusinya. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dapat hadir secara langsung di lokasi penyaluran. Dalam situasi seperti ini, petugas dari PT Pos Gresik harus mengambil inisiatif untuk mengantarkan bantuan tersebut langsung ke tempat tinggal KPM atau bisa disebut dengan strategi jemput bola.

Adapun pernyataan langsung dari Bapak Abu Bakar selaku SPV Administrasi Keuangan dan Dukungan Umum, beliau mengatakan bahwa:

> *"Dalam proses penyaluran bansos ini, pasti ada berbagai tantangan yang kami hadapi, baik saat melakukan jemput bola ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun ketika menuju titik penyaluran bantuan sosial di desa-desa setempat. Salah satu tantangan yang baru-baru ini kami alami terjadi saat perjalanan menuju Kecamatan Benjeng, di mana petugas Pos mengalami kesulitan akibat kondisi banjir di wilayah tersebut. Selain itu,*

kami juga harus menyebrangi pulau untuk menjangkau wilayah Gresik yang terpisah secara geografis, yaitu Pulau Bawean. Dalam kondisi seperti ini, kami harus menggunakan perahu dan berbagai moda transportasi lainnya, yang tentu mempengaruhi waktu penyaluran. Akibatnya, penyerapan bantuan menjadi tertunda karena kendala waktu." (Hasil Wawancara dengan petugas dari PT Pos Gresik pada tanggal 1 Maret 2025).

b. Tepat kuantitas

Dalam proses penyaluran bantuan sosial, aspek tepat kuantitas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap penerima mendapatkan jumlah bantuan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kuantitas atau jumlah bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) telah sesuai berdasarkan kemampuan dan komposisi dalam satu keluarga KPM itu sendiri. Ada yang mendapatkan bantuan sembako, ada yang mendapatkan bantuan berupa uang tunai dan ada pula yang mendapat keduanya. Bantuan yang disalurkan berupa bantuan tunai ini bersumber dari Kementerian Sosial. Secara umum, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp600.000 setiap triwulan, yang jika dirata-ratakan setara dengan Rp200.000 per bulan. Namun, besaran bantuan tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta komposisi anggota keluarga dalam rumah tangga KPM yang bersangkutan.

Ada pula pembagian bantuan dalam bentuk sembako, yaitu umumnya berupa beras. Bantuan ini bersumber dari Badan Pangan Nasional. Semua itu dilihat berdasarkan data murni dari pemberi kerja yaitu untuk bantuan PKH berupa uang tunai dari Kementerian Sosial, sedangkan BPNT berupa sembako dari Badan Pangan Nasional. PT Pos Gresik berkomitmen penuh dalam menyalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada KPM sesuai dengan data. Terdapat KPM yang menerima bantuan berupa uang tunai, sembako, dan bahkan ada yang menerima keduanya.

Untuk bantuan yang tidak berhasil disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dana tersebut secara otomatis harus disetorkan kembali ke kas negara. Proses ini mengikuti mekanisme *closing* dan *cut-off* yang ditetapkan pada tanggal 30 setiap bulannya. Setelah tanggal tersebut, penyaluran bantuan tidak lagi diperbolehkan. Sebagai bagian dari prosedur pertanggungjawaban, laporan harus dibuat untuk merinci jumlah bantuan yang telah berhasil disalurkan dan yang tidak terbayarkan. Selanjutnya, dana yang tidak terbayarkan wajib disetorkan kembali ke kas negara melalui Kantor Pusat PT Pos Indonesia.

c. Tepat kualitas

Dalam penyaluran bantuan sosial, aspek tepat kualitas sangat penting agar bantuan yang diterima, seperti sembako, benar-benar layak konsumsi, tidak rusak, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas bantuan serta menjamin bahwa bantuan yang diterima benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Kualitas bantuan juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang bertanggung jawab dan manusiawi.

PT Pos Gresik sebagai salah satu mitra penyalur bantuan sosial memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bantuan yang disalurkan telah memenuhi standar tersebut. Sebelum distribusi dilakukan, PT Pos Gresik melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi barang, khususnya sembako, guna menjamin bahwa bantuan yang diterima oleh KPM dalam keadaan baik dan layak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan mutu dan kontrol distribusi agar bantuan tidak hanya sampai tepat sasaran, tetapi juga dalam kondisi yang sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

d. Tepat sasaran

Pemerintah telah menyerahkan data penerima bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada PT Pos Indonesia untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PT Pos Gresik selaku pelaksana di wilayah setempat telah menjalankan penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan data valid yang diterima. Dalam proses pelaksanaannya, PT Pos Gresik juga menjalin kerja sama dengan perangkat desa, khususnya di desa-desa yang memiliki sejumlah penerima manfaat, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi bantuan.

Kerja sama ini tidak hanya bertujuan memperlancar penyaluran, tetapi juga memungkinkan perangkat desa berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Pihak desa diberi kewenangan untuk memastikan apakah KPM yang tercantum dalam data masih tergolong tidak mampu, apakah mereka masih hidup, serta apakah mereka dapat mengambil bantuan secara langsung atau membutuhkan pengantaran ke rumah. Informasi hasil verifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada PT Pos Gresik sebagai dasar untuk menentukan strategi penyaluran yang tepat. Selain itu, data yang telah diperbarui tersebut dilaporkan kembali sebagai umpan balik kepada pemerintah pusat guna mendukung pembaruan data penerima bantuan secara berkelanjutan dan akurat.

Berdasarkan hasil analisis di atas, delivery activities bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh PT Pos Gresik sudah cukup baik. PT Pos selalu mengusahakan agar penyaluran bantuan ini dapat maksimal pada tiap periodenya, sebagaimana yang dikatakan Bapak Saiful selaku SPV Operasi Pelayanan:

> *"Intinya pihak PT Pos Gresik pasti melakukan yang terbaik supaya penyaluran bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) sampai di tangan KPM dengan cepat dan tepat sasaran, berbagai macam tantangan juga sudah kami tangani, mulai dari kondisi alam yang menghambat, perjalanan yang jauh, menemui berbagai macam kondisi masyarakat, bahkan ada pula, mohon maaf ya, ODGJ dan sebagainya. Kita berusaha agar bantuan ini terealisasikan sesuai alokasinya, namun ada beberapa hal yang memang akhirnya tidak bisa tersalurkan, contohnya KPM meninggal, pindah tempat tinggal, atau sudah mampu."* (Hasil Wawancara dengan petugas dari PT Pos Gresik pada tanggal 1 Maret 2025).

C. Pemanfaatan

Tahapan implementasi kebijakan tidak berhenti pada penyaluran atau *delivery activities*, melainkan berlanjut hingga kepada bagaimana kelompok sasaran menggunakan atau memanfaatkan *policy output* tersebut. Menurut teori implementasi kebijakan publik, salah satu indikator keberhasilan implementasi adalah apabila hasil kebijakan (*outputs*) benar-benar digunakan secara tepat oleh kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan (*policy objectives*). Dalam konteks ini, *policy output* berupa bantuan sosial yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan dasar kehidupan dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.

Program Bantuan Sosial Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui Kantor Pos Gresik merupakan bagian dari strategi nasional dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan dan perlindungan sosial. Bantuan Sembako ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga miskin, sedangkan PKH lebih difokuskan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan bersyarat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful selaku penanggung jawab teknis program bantuan sosial di PT Pos Gresik serta Pak Abu Bakar selaku SPV Administrasi Keuangan dan Dukungan Umum, diketahui bahwa secara umum pemanfaatan bantuan sosial oleh KPM telah berjalan sesuai dengan tujuan program. Pada program Sembako, KPM menerima bantuan dalam bentuk komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur. Bantuan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga, terutama pada saat kondisi ekonomi rumah tangga sedang melemah, seperti pada periode inflasi atau kenaikan harga bahan pokok. Dengan adanya bantuan ini, beban pengeluaran rumah tangga KPM dapat ditekan, sehingga memungkinkan mereka mengalokasikan dana yang tersisa untuk kebutuhan lain yang mendukung keberlangsungan hidup.

Sementara itu, pada Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan yang disalurkan dalam bentuk uang tunai digunakan oleh KPM untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka, khususnya dalam pembelian perlengkapan sekolah, transportasi, dan biaya penunjang lainnya. Sebagian KPM juga menggunakan dana tersebut untuk mendukung aspek kesehatan keluarga, seperti membawa anak ke posyandu, membeli obat-obatan dasar, atau memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, sesuai dengan ketentuan program yang bersyarat. pemanfaatan yang tepat dan berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi antara pelaksanaan penyaluran dan peran pendamping sosial. Pendamping berperan dalam memberikan informasi, mengawasi pemanfaatan bantuan, serta membina keluarga penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, tahapan pemanfaatan bantuan sosial merupakan refleksi dari efektivitas implementasi kebijakan secara menyeluruh. Ketepatan penggunaan bantuan oleh KPM menunjukkan bahwa program telah diterima dan diinternalisasi dengan baik oleh masyarakat sasaran. Namun demikian, pemanfaatan yang ideal tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga harus diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan menggunakan teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015), implementasi penyaluran bantuan sembako dan Program Keluarga

Harapan (PKH) melalui PT Pos Gresik dapat diketahui telah berjalan dengan baik dan efektif meskipun masih terdapat tantangan yang sedikit menghambat proses penyaluran bantuan tersebut. PT Pos Gresik sendiri juga telah menjalankan peran dan tugasnya dengan sangat baik sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial ini

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT Pos Gresik telah berjalan dengan baik dan efektif, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015), ketiga aspek utama yaitu sosialisasi, penyaluran (*delivery activities*), dan pemanfaatan telah terpenuhi dengan baik. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dan kolaboratif dengan perangkat desa, terbukti efektif dengan kehadiran KPM yang tertib. Penyaluran bantuan (*delivery activities*) juga dinilai cukup baik dari segi ketepatan waktu, kuantitas, kualitas, dan sasaran. Meskipun demikian, kendala seperti kondisi geografis (banjir, penyeberangan pulau) dan ketidakhadiran KPM di lokasi penyaluran masih menjadi tantangan yang terkadang menghambat ketepatan waktu. Kuantitas dan kualitas bantuan telah disalurkan sesuai standar, dan proses verifikasi data KPM melalui kerjasama dengan pihak desa memastikan ketepatan sasaran. Terakhir, pemanfaatan bantuan oleh KPM secara umum telah sesuai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung peningkatan kualitas hidup, baik melalui komoditas pangan maupun bantuan tunai untuk pendidikan dan kesehatan. PT Pos Gresik telah menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah dengan dedikasi tinggi, berupaya maksimal dalam memastikan bantuan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan.

Meskipun penyaluran bantuan telah efektif, disarankan bagi PT Pos Gresik untuk terus berinovasi dalam strategi "jemput bola" guna meminimalisir dampak hambatan geografis dan ketidakhadiran KPM, mungkin dengan melibatkan lebih banyak tenaga lokal di daerah terpencil atau memanfaatkan teknologi untuk penjadwalan yang lebih fleksibel. Selain itu, kolaborasi dengan perangkat desa dan pendamping sosial perlu diperkuat, khususnya dalam pembaruan data KPM secara berkala untuk mengurangi kasus KPM yang sudah meninggal, pindah, atau sudah mampu, sehingga alokasi bantuan dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Pemerintah pusat juga dapat mempertimbangkan variasi waktu perpanjangan penyaluran yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ekstrem, untuk memastikan seluruh alokasi tersalurkan secara maksimal dan mencapai pencapaian 100%. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, M. L., & Kalvin Edo Wahyudi. (2023). Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, *6*(4), 1208–1219. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251

Ananda, R. S. (2023). Kemensos dan BUMN Sepakati Skema Penyaluran Bansos Melalui Himbara dan PT Pos. *Kemensos.Go.Id*. https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/kemensos-dan-bumn-sepakati-skema-penyaluran-bansos-melalui-himbara

Arnani, M. (2025). Bansos PKH 2025 Tahap 2: Jadwal Pencairan dan Cara Cek Penerimanya. *Kompas.Com*. https://money.kompas.com/read/2025/05/22/135834526/bansos-pkh-2025-tahap-2-jadwal-pencairan-dan-cara-cek-penerimanya

Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*.

Kemensos RI. (2025). *Program Sembako*. https://kemensos.go.id/page/Program-Sembako-1

Mardiah, F., Islami, J., Irawan, M. F., & Pratama, I. N. (2024). *Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu*. *13*.

Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*.

Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia. *International Policy Centre for Inclusive Growth*, *1*(42), 1.

Palili, M. G. I., Indriasari, R., Kartini, D. E., & Mendrofa. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, *8*(1), 7746–7754.

Pemprov DKI Jakarta. (2015). Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapata. *Jakarta.Bpk.Go.Id*, 1–14. https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf

Purwanto, E. A. dan D. R. S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (2nd ed.). Gava Media.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Dan Pasal 27 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangganan Fakir Miskin (2011).

Verianty, W. A. (2022). *PT POS Indonesia, Kenali Profil, Sejarah Serta Produk dan Layanannya*. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/hot/read/5140499/pt-pos-indonesia-kenali-profil-sejarah-serta-produk-dan-layanannya

Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.